

Pengaruh Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Jambi

Samila^{1*}, Halkadri Fitra²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: samilarubi@gmail.com

Tanggal Masuk:

31 Juli 2024

Tanggal Revisi:

05 November 2024

Tanggal Diterima:

14 Februari 2025

Keywords: *Good*

Governance; Internal

Control System; Local

Government Financial

Performance;

Organizational Culture;

Risk Management;

How to cite (APA 6th style)

Samila & Fitra, H. (2025). Pengaruh Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7 (1), 406-416.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v7i1.2049>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of Risk Management and Internal Control Systems on the Financial Performance of Jambi City Local Government. The research sample consisted of 104 respondents selected through the purposive sampling technique. Primary data was collected using a questionnaire as a research instrument and analyzed using the Multiple Linear Regression Analysis method with the help of the SPSS 23 application. The results showed that both Risk Management and Internal Control Systems had a significant positive effect on Local Government Financial Performance. This research is limited to the local government of Jambi City and uses a questionnaire that can cause bias. Future research should use a wider sample, collect primary data through interviews, and consider additional variables that affect Financial Performance.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dan seluruh organisasi wajib menyediakan laporan keuangan, yang memuat rincian tentang kondisi keuangan dan efisiensi organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib membentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menunjukkan pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang dilimpahkannya. Tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang optimal dalam pelaksanaan keuangan daerah. Pengungkapan informasi keuangan oleh pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mendukung pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Karenanya, pemerintah daerah perlu melakukan pemeriksaan mendalam terhadap informasi dalam laporan keuangan untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang efisien.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai berdasarkan seberapa baik pengelolaan sumber daya keuangan dilakukan. Menurut Mengkuningtyas & Adib (2015), kinerja yang optimal dapat memberikan keuntungan signifikan, seperti peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah (Mardiasmo, 2022). Cara untuk memastikan laporan keuangan bebas dari kekeliruan material, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan yang relevan. Namun, BPK tidak secara khusus menilai seberapa efektif sistem pengendalian internal atau kepatuhan terhadap peraturan dalam proses pemeriksaannya.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 mengidentifikasi sejumlah kelemahan dalam sistem pengendalian internal serta beberapa ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Contohnya, ditemukan pembayaran honorarium yang melanggar Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp811,11 juta. Selain itu, terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian pembayaran dengan spesifikasi teknis pada beberapa proyek belanja modal senilai Rp1,43 miliar, serta pemusnahan aset tetap yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang berpotensi menyebabkan kerugian sebesar Rp665,77 juta. (LKPD Kota Jambi, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan penerapan manajemen risiko di seluruh instansi pemerintah. Manajemen risiko dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan, seperti mempertimbangkan risiko ketika mengambil keputusan, mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko, dan membangun sistem informasi untuk memfasilitasi pelaporan penilaian risiko secara berkala. Menurut penelitian Suwanda (2020), manajemen risiko memiliki peran penting dalam mengurangi risiko keuangan dan mendukung pencapaian kinerja yang optimal di sektor pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan di negara berkembang. Selain itu, penelitian oleh Nugraha & Novianty (2022) menemukan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan inti dari kinerja keuangan yang baik di sektor publik.

Pedoman umum untuk penerapan manajemen risiko di Indonesia dapat ditemukan dalam Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization* (SNI ISO) 31000:2018. Standar ini memberikan rekomendasi tentang bagaimana organisasi harus mengelola risiko yang mereka hadapi. Organisasi pemerintah pertama yang memasukkan manajemen risiko ke dalam prosedur operasionalnya adalah Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008. Sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga telah mengadopsi manajemen risiko.

Pengendalian internal adalah sistem penting dalam organisasi yang dipengaruhi oleh faktor manusia dan teknologi informasi. Sistem ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan memberikan arahan, melakukan pengawasan, dan mengukur penggunaan sumber daya yang ada (Omposunggu & Salomo, 2019). Committee of Sponsoring Organizations (1992) mengartikan pengendalian internal sebagai serangkaian proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan staf lainnya untuk memberikan kepastian yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Proses ini mencakup efektivitas dan efisiensi operasional, akurasi laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengendalian internal berfungsi sebagai fondasi untuk mencapai berbagai tujuan organisasi, termasuk menjaga aset dan memastikan laporan keuangan yang akurat. Keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah sangat bergantung pada keefektifan sistem pengendalian internal (Romney & Steinbart, 2017). Penelitian Mattoasi et al. (2021) dan Noviyana & Pratolo (2018) bahwa pengendalian internal yang kuat dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali interaksi kompleks antara manajemen risiko dan sistem pengendalian internal guna memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap pemahaman mengenai optimalisasi kinerja keuangan dalam ranah pemerintahan daerah. Fenomena yang terjadi di lapangan juga mendukung urgensi penelitian terhadap dua variabel ini. Berdasarkan laporan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022, ditemukan kelemahan dalam pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap peraturan yang relevan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian internal masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang dapat berdampak negatif pada efektivitas kinerja keuangan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen risiko, namun implementasinya masih perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi dapat diminimalkan secara efektif. Baik manajemen risiko maupun pengendalian internal merupakan pilar utama dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Penerapan keduanya dapat membantu memastikan bahwa pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik dan mencapai tujuan keuangan dengan lebih baik.

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976), yang memandang hubungan antara masyarakat dan pemerintah sebagai hubungan keagenan. Dalam hubungan ini, masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang menggunakan pemerintah sebagai agen untuk memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan laporan keuangan secara teratur untuk mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelolanya, memungkinkan legislatif dan masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Mattoasi et al., 2021).

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling (1976) Teori keagenan mengacu pada hubungan di mana satu atau lebih pihak (prinsipal) memberi tanggung jawab kepada pihak lain (agen) untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan atas nama mereka, yang melibatkan penyerahan sebagian hak pengambilan keputusan kepada agen. Pada hubungan ini, agen mewakili prinsipal dan bertindak untuk kepentingan terbaiknya. Hubungan ini terbentuk melalui kontrak di mana masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang mengandalkan pemerintah sebagai agen untuk menyediakan layanan yang menguntungkan masyarakat.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Bastian (2010) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah mengacu pada penilaian keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu. Ada tiga gagasan mendasar yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah Mardiasmo (2002), yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*.

Manajemen Risiko

Hopkins (2017) menyatakan bahwa manajemen risiko bertujuan mencapai hasil yang menguntungkan dengan meminimalkan variabilitas, namun tidak bertujuan menghilangkan risiko sepenuhnya. Menurutnya, keberhasilan bisnis memerlukan pengambilan risiko yang diperhitungkan, bukan risiko sembarangan. Hopkins menyebut penilaian risiko sebagai proses mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang paling serius. *British Standards BS 31100* mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses komprehensif yang melibatkan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah sistem penting dalam organisasi yang dipengaruhi oleh faktor manusia dan teknologi informasi. Sistem ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan memberikan arahan, melakukan pengawasan, dan mengukur penggunaan sumber daya yang ada. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) terdapat 5 (lima) unsur dari SPIP yang dimaksud agar dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral Instansi Pemerintah, yaitu: Lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Internal.

Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nugraha & Novianty (2022) memaparkan bahwa manajemen risiko di lingkungan pemerintah sangat penting untuk dilakukan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas kinerja keuangan di perangkat daerah, sehingga dapat mengurangi risiko yang muncul. Suwanda (2020) menekankan pentingnya pelaporan keuangan yang sistematis. Muhammad Asir *et al.* (2023) menemukan bahwa manajemen risiko berdampak positif pada kesuksesan perusahaan dengan mengoptimalkan sumber daya dan profitabilitas.

Teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen risiko yang efektif dapat mengurangi ketidaksesuaian kepentingan antara prinsipal dan agen dengan memastikan bahwa agen bertindak selaras dengan tujuan prinsipal. Implementasi manajemen risiko yang baik membantu dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi risiko yang dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan. Ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga mendukung pencapaian hasil keuangan yang lebih baik di sektor publik.

H1: Manajemen risiko berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal diterapkan untuk mencapai tujuan, mengurangi deviasi dari rencana, meningkatkan efisiensi, mengurangi kehilangan aset, meningkatkan keandalan data pelaporan keuangan, dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Pengendalian internal bersifat proaktif, mengambil tindakan perbaikan saat terjadi kejadian tidak terduga. Penelitian Pujiono *et al.* (2016); Purwaningsih & Amalia (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik secara signifikan meningkatkan kinerja perusahaan dan pemerintah daerah.

Teori agensi mendukung bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang baik akan menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik di sektor publik. Pada konteks pemerintah daerah, sistem pengendalian internal yang kuat memastikan agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, mengurangi risiko penyimpangan dan ketidakpatuhan, serta meningkatkan efisiensi operasional dan keandalan pelaporan keuangan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan.

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi terdiri dari pejabat struktural pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kota Jambi. Dari 38 SKPD yang ada, sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling, dengan masing-masing SKPD diwakili oleh 3 responden, yaitu Kepala Bagian Keuangan, Bendahara, dan Staf Akuntansi/Keuangan. Total responden yang berpartisipasi sebanyak 114 orang. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan langsung kepada para responden

untuk memastikan data yang diperoleh relevan, dapat dipercaya, objektif, dan dapat menjadi landasan penelitian (Ghozali, 2016). Pengukuran variabel manajemen risiko dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan indikator penelitian yang diukur menggunakan skala Likert 1-5 (Sekaran & Bougie, 2016). Indikator manajemen risiko mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko (Thermalia, 2014). Indikator sistem pengendalian internal terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Widiyaningsih, 2019). Indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi transparansi, akuntabilitas, dan *value for money* (Widiyanta, 2017). Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

UJI INSTRUMEN

Uji Validitas

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Instrumen Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Corelation</i> terkecil	Keterangan
Kinerja Keuangan (Y)	0,417	Valid
Manajemen Risiko (X1)	0,693	Valid
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,658	Valid

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2024

Menurut Sekaran & Bougie (2016), validitas adalah sejauh mana suatu instrumen mengukur apa yang diklaimnya diukur, dan terdiri dari dua aspek: validitas internal, yang mengukur ketepatan dalam menggambarkan data yang dikumpulkan, dan validitas eksternal, yang mengukur apakah temuan dapat diterapkan pada skenario berbeda. Instrumen dianggap valid jika hubungan antara item pertanyaan dan skor keseluruhan signifikan, dengan data dinyatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$. Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item Total Corelation* untuk masing-masing instrumen. Nilai r_{hitung} variabel Kinerja Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Internal lebih besar dari r_{tabel} yakni 0,193. Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan variabel Kinerja Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Internal adalah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kinerja Keuangan (Y)	0,917	Reliabel
Manajemen Risiko (X1)	0,927	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,903	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2024

Menurut Sekaran & Bougie (2016), uji reliabilitas berfungsi untuk menilai konsistensi dan stabilitas instrumen penelitian. Konsistensi mengacu pada sejauh mana item-item dalam sebuah kelompok mengukur konsep yang sama, yang dinilai melalui Cronbach Alpha (α). Semakin mendekati nilai Cronbach Alpha (α) ke angka 1, semakin tinggi konsistensi internalnya. Reliabilitas dianggap rendah jika nilainya kurang dari 0,60, diterima jika berada di sekitar 0,70, dan baik jika lebih dari 0,80. Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha untuk masing-masing variabel, yaitu Kinerja Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Internal, semuanya lebih besar dari 0,70. Oleh karena itu,

dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk ketiga variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Analisis Deskriptif

Tabel 3
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Manajemen Risiko (X1)	104	32	55	41.0769	5.55238
Sistem Pengendalian Internal (X2)	104	32	50	40.6538	4.25582
Kinerja Keuangan (Y)	104	60	100	81.8654	7.97333
Valid N (listwise)	104				

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa penelitian ini melibatkan 104 responden. Setiap variabel diukur menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1 hingga 5. Variabel Manajemen Risiko, yang terdiri dari 11 item pernyataan, memiliki skor terendah 32 dan tertinggi 55, dengan rata-rata 41,08 dan standar deviasi 5,55. Variabel Sistem Pengendalian Internal mencakup 10 item pernyataan, dengan skor minimum 32 dan maksimum 50, serta rata-rata 40,65 dan standar deviasi 4,25. Variabel Kinerja Keuangan terdiri dari 20 item pernyataan, memiliki nilai terendah 60 dan tertinggi 100, dengan rata-rata 81,86 dan standar deviasi 7,97.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.15560399
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.049
	Negative	-.086
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.055 ^c

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2024

Tabel 4 menampilkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yang menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,055. Ini menunjukkan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal, karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, model regresi ini dianggap valid untuk analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	21,790	7,974		2,733	,007		
	Manajemen Risiko	,203	,137	,142	1,477	,143	,657	1,521

Sistem Pengendalian Internal	,146	,189	,078	,772	,442	,590	1,694
------------------------------	------	------	------	------	------	------	-------

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2024

Menurut Sekaran & Bougie (2016), Uji multikolinearitas menilai hubungan signifikan antara variabel independen. Model regresi dianggap optimal jika tidak ada korelasi di antara variabel independen. Korelasi signifikan antar variabel menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak orthogonal. Evaluasi dilakukan dengan mengamati nilai VIF yang melebihi 10 dan toleransi kurang dari 0,1. Berdasarkan Tabel 5, nilai *tolerance* variabel Manajemen Risiko adalah 0,657 dengan VIF 1,521, sedangkan nilai *tolerance* untuk Sistem Pengendalian Internal adalah 0,590 dengan VIF 1,694. Ini menunjukkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas, yang berarti tidak ada korelasi di antara variabel bebas sehingga model ini siap digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	-3,217	5,097		-,631	,529
Manajemen Risiko	-,144	,088	-,198	-1,638	,105
Sistem Pengendalian Internal	,082	,121	,086	,674	,502

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel 6 di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi Manajemen Risiko (0,10), dan Sistem Pengendalian Internal (0,50) lebih besar dari 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dan layak untuk diteliti.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	32,770	8,171		4,011	,000
Manajemen Risiko	,328	,145	,229	2,259	,026
Sistem Pengendalian Internal	,528	,180	,282	2,923	,004

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2024

Berdasarkan Tabel 7 di atas, persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 32,770 + 0,328 X_1 + 0,528 X_2 + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui, konstanta sebesar 32,770 menunjukkan bahwa jika Manajemen Risiko (X_1) dan Sistem Pengendalian Internal (X_2) bernilai 0, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan sebesar 32,770. Kedua, koefisien b_1 sebesar 0,328 (positif) berarti bahwa setiap peningkatan 1% dalam Manajemen Risiko akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,328. Ketiga, koefisien b_2 sebesar 0,528 (positif) mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1% dalam Sistem Pengendalian Internal akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar

0,528. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa baik Manajemen Risiko maupun Sistem Pengendalian Internal memiliki dampak positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

UJI HIPOTESIS Uji Statistik F

Tabel 8
Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1903,814	3	634,605	13,735	.000 ^b
Residual	4620,407	100	46,204		
Total	6524,221	103			

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2024

Berdasarkan Tabel 8 di atas dapat diketahui nilai F_{hitung} sebesar 13,735 > F_{tabel} sebesar 2,696 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.540 ^a	.292	.271	6,79736

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2024

Dari tabel 9, diketahui bahwa nilai Adjusted R-Square adalah 0,271 atau 27,1%. Ini berarti bahwa 27,1% variasi dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal. Sisanya, sebesar 72,9%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam analisis penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10
Uji t

Model	t	Hipotesis	Sig.	Kesimpulan
1 (Constant)	4,011		,000	
Manajemen Risiko	2,259	Positif	,026	Diterima
Sistem Pengendalian Internal	2,923	Positif	,004	Diterima

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2024

Menurut Ghozali (2018) Uji t digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh variabel independen secara individu dalam menjelaskan variabel dependen. Kriteria pengujian yaitu: Jika sig < 0,05, t_{hitung} > t_{tabel} , maka hipotesis diterima. Jika sig > 0,05, t_{hitung} < t_{tabel} , maka hipotesis ditolak.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Manajemen risiko berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Tabel 10 di atas, diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,259 > t_{tabel} sebesar 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,026 < 0,05. Hal ini berarti Manajemen risiko berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama, **diterima**.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Tabel 10 di atas, diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar $2,923 > t_{tabel}$ sebesar $1,984$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Hal ini berarti Sistem Pengendalian Internal berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua, **diterima**.

Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian membuktikan bahwa Manajemen Risiko berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, artinya semakin tinggi penerapan Manajemen Risiko, semakin baik Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian Nugraha & Novianty (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan Manajemen Risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Selain itu, Muhammad Asir *et al.* (2023) dalam penelitiannya menekankan bahwa Manajemen Risiko memainkan peran penting dalam kinerja perusahaan, sehingga berkontribusi positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Tias *et al.* (2023) juga mendukung bahwa Manajemen Risiko merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja karyawan dengan mengenali dan mengelola risiko yang dapat mengganggu kemampuan perusahaan untuk mencapai nilai yang ditargetkan.

Teori agensi menekankan pentingnya pengelolaan risiko untuk meminimalkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Apabila Manajemen Risiko efektif, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terukur dan hati-hati. Hal ini juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan, membantu meminimalkan potensi kerugian finansial, serta memastikan keputusan yang diambil agen sesuai dengan kepentingan terbaik prinsipal. Temuan ini menegaskan pentingnya Manajemen Risiko dalam mencapai kinerja keuangan yang lebih baik di sektor publik.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal berbanding lurus dengan peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Musah *et al.* (2022); Pujiono *et al.* (2016); Welly (2021), yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Keberhasilan kinerja instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal yang efektif, yang memotivasi, mengukur, dan memberikan sanksi terhadap tindakan manajer serta karyawan dalam organisasi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Purwaningsih & Amalia (2021), yang menunjukkan bahwa kinerja perusahaan secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal.

Penelitian ini juga sejalan dengan teori agensi, yang menekankan pentingnya mekanisme pengendalian untuk mengurangi konflik kepentingan dan perilaku oportunistik antara prinsipal (masyarakat atau pemegang kepentingan) dan agen (pemerintah atau manajemen publik). Kinerja keuangan yang baik membutuhkan Sistem Pengendalian Internal yang kuat untuk meminimalisir risiko kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan. Oleh karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Internal agar kinerja keuangan pemerintah daerah berkualitas tinggi. Semakin baik Sistem Pengendalian Internal, semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan manajemen risiko, semakin meningkat pula kinerja keuangan yang dicapai. Selain itu, sistem pengendalian internal juga terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan dengan baik, namun memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: (1) penelitian hanya dilakukan pada pemerintah daerah Kota Jambi, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk semua pemerintah daerah di Indonesia; (2) penggunaan metode survei dengan kuesioner dalam penelitian ini bisa mempengaruhi hasil karena persepsi yang dituliskan oleh responden mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya; (3) penelitian ini tidak mempertimbangkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran agar penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih luas yang mencakup beberapa pemerintah daerah lain. Selain itu, penelitian dapat memanfaatkan data primer, seperti wawancara, untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Peneliti juga disarankan mempertimbangkan variabel lain yang berkaitan langsung dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan, seperti kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia di bidang keuangan, dan penerapan teknologi informasi akuntansi, yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2022.
- Committee of Sponsoring Organization (COSO). (1992). *Internal Control-Integrated Framework*.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, I. (2016). *Desain penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk akuntansi, bisnis, dan ilmu sosial lainnya*. Yoga Pratama.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hopkins, P. (2017). *Fundamental of Risk Management* (4th ed.). Kogan Page Limited.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 308.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mattoasi, Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109.

- Mengkuningtyas, Y., & Adib, N. (2015). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Pemekaran. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1).
- Muhammad Asir, Yuniawati, R. A., Mere, K., Sukardi, K., & Anwar, M. A. (2023). Peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan: studi manajemen sumber daya manusia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 4(1), 32–42.
- Musah, A., Padi, A., Okyere, B., Adenutsi, D. E., & Ayariga, C. (2022). Does corporate governance moderate the relationship between internal control system effectiveness and SMEs financial performance in Ghana? *Cogent Business & Management*, 9(1).
- Noviyana, R. A., & Pratolo, S. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Intervening : Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 129–143.
- Nugraha, Y. D., & Novianty, I. (2022). Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. *Prosiding The 13th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 1408–1411.
- Omposunggu, S. G., & Salomo, R. V. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 5(1), 78–86.
- Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Bisma*, 10(1), 68–81.
- Purwaningsih, F. N., & Amalia, M. M. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Cv. Sukses Abadi). *Worksheet : Jurnal Akuntansi*, 1(1), 53–61.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2017). *Accounting Information System Pearson Education Limited*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* (Seventh Ed). John Wiley & Sons Ltd.
- Suwanda, D. (2020). Risk Management Solutions in Local Government Financial Management Dadang. *AYER Journal*, 27(3), 34–81.
- Thermalia, Y. (2014). *Pengaruh Internal Audit dan Pengendalian Internal terhadap Manajemen Risiko*.
- Tias, T. N., Taupiq, M. N., Syadila, S. P., & Zalfadiva, D. S. (2023). Penerapan manajemen risiko terhadap kinerja karyawan di Indonesia : Literature Review. *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Welly. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(1), 133.
- Widiyaningsih, D. (2019). *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Pati)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Widiyanta, M. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Perspektif Pegawai Atas Kinerja Pemerintah dengan Pendekatan Value For Money Pada SKPD Kulon Progo (Survey Pada SKPD Kabupaten Kulon Progo DIY)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.